

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan masyarakat merupakan fenomena yang muncul sepanjang manusia hidup bermasyarakat dan keinginan manusia untuk memperoleh pemahaman tentang pembangunan masyarakat tersebut dilakukan melalui kajian pembangunan masyarakat. Dalam kajian tentang pembangunan masyarakat ini dikenal berbagai perspektif. Pembangunan masyarakat selama ini utamanya di Negara-negara sedang berkembang dapat dilihat adanya perspektif yang dominan. Perspektif tersebut pada eranya telah mewarnai kebijakan dan pelaksanaan pembangunan masyarakat Negara-negara yang sedang berkembang. Pembangunan saat ini lebih dipusatkan pada manusia. Model pembangunan yang berpusat pada manusia (*people centered*) serta terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, tetapi yang lebih penting lagi adalah pada upaya meningkatkan kualitas manusia agar dapat meningkatkan partisipasi secara nyata dalam berbagai aktifitas kehidupan untuk mendorong terciptanya kegiatan produktif yang bernilai tinggi. Pembangunan merupakan sebuah proses pengembangan kapasitas masyarakat dalam jangka panjang sehingga memerlukan perencanaan yang tepat dan akurat. Perencanaan ini berarti harus mampu mencakup kapan, di mana dan bagaimana pembangunan harus dilakukan agar mampu merangsang pertumbuhan ekonomi dan sosial secara berkesinambungan. Untuk itu

diperlukan kinerja yang baik bagi pemerintah dalam mengelolah segala sumber daya yang ada agar pembangunan dapat berhasil dan tepat sasaran (Hardianto 2019).

Desa merupakan tingkat paling bawah dalam pemerintah Desa diharuskan mempunyai tata pemerintahan yang tersusun dengan baik dan mempunyai payung hukum yang kuat untuk menjadikan desa sebagai tempat yang menyimpan segala urusan yang berhubungan dengan masyarakat desa. Di dalam suatu desa haruslah terdapat unsur-unsur desa, terutama Pemerintah Desa tersebut terdiri dari Kepala Desa dan dibantu oleh Aparat Desa. Pemerintah Desa bertugas untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat Desa dalam segala bidang, diantaranya dalam bidang pembangunan kawasan pedesaan. Pembangunan kawasan pedesaan sangatlah penting dikarenakan melalui pembangunan kawasan pedesaan itu Desa akan menjadi maju. Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan Desa. Hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintah Desa mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintah Desa, dan meningkatnya daya saing Desa Berkaitan dengan proses pembangunan desa, di dalam prosesnya pembangunan desa terdiri dari swadaya masyarakat dan pembinaan yaitu masyarakat dan pemerintah desa. Agar pembangunan bisa terlaksana tentunya harus ada kerjasama yang baik antara pemimpin dan masyarakat yang dipimpinnya. Kepala Desa dalam hal ini sangat

berperan dalam pembangunan desa di mana Kepala Desa yang merupakan pemimpin formal di desa serta memiliki tugas dan kewajiban dalam menyelenggarakan Pemerintah Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pemimpin perlu melakukan komunikasi dan pembinaan serta penyuluhan kepada masyarakat yang berada di Desa. Agar program Pemerintah efektif maka perlu adanya kepemimpinan Kepala Desa dalam mengarahkan dan melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi baik dalam hal perencanaan, Pelaksanaan program pembangunan desa. Penilaian masyarakat terhadap kinerja Kepala Desa sangat dibutuhkan, karena ini akan menjadi evaluasi terhadap program kerja yang dilaksanakan kemudian. Seorang Kepala Desa harus memiliki kinerja yang baik dan benar-benar memperhatikan kondisi, karakteristik, dan harapan masyarakat yang dipimpinnya. Kinerja seorang Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintahan Desa harus dapat menjalankan tugas pokok memimpin dan mengkoordinasi Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan desa. Dalam pandangan masyarakat terhadap kinerja Kepala Desa sangat diperlukan untuk mengkondisikan masyarakat menuju arah perbaikan dalam semua tatanan kehidupan mereka. (Risti Yuli Prawesti 2018).

Berdasarkan penelitian terdahulu menyatakan bahwa Kinerja Kepala Desa Dalam Pelayanan Publik Di Desa Borowosi Kecamatan Ulunoyo Kabupaten Nias Selatan dapat dijelaskan bahwa Peran interpersonal merupakan peran sebagai pemimpin dan penghubung yang mampu menghadapi situasi apapun dan mampu tampil sebagai

figur mewakili bawahan dalam menangani persoalan hukum dan sosial. Berdasarkan kesimpulan tersebut kinerja Kepala Desa Borowosi dalam pelayanan publik, dapat disimpulkan bahwa kinerja pemerintah desa Borowosi Kecamatan Ulunoyo dalam pelayanan publik bidang administrasi kependudukan dan pembuatan surat-surat dan pelayanan lainnya sesuai dengan tugas kepala desa serta masing-masing aparat desa sangat baik dengan lebih mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan yang dipengaruhi oleh faktor pengabdian kepada masyarakat dengan harapan masyarakat melalui kualitas pelayanan prima tercermin kualitas keterbukaan dan akuntabilitas dimana kebersamaan hak dan kemampuan atau kepekaan pada harapan masyarakat dalam pelayanan public. (Odaligo Ndruru dan Ridahayati Halawa 2018).

Sofyanto Torau (2019) tentang judul Analisis Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Masyarakat Di Desa Bontomanai Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar Sebagaimana dijelaskan dalam Permendagri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa yang menyatakan bahwa pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakatnya dengan semangat gotong royong. Adapun hasil kerja pemerintah Desa dapat dilihat dari indikator kinerja yakni: kuantitas kerja (*quantity of work*), kualitas kerja (*quality of work*), pengetahuan kerja (*job knowledge*), kreativitas (*creativiness*), kerjasama (*cooperation*) dan kualitas pribadi (*personal qualities*) (Bernardin, H.J. & Russel, 1993). Berdasarkan kesimpulannya bahwa hasil penelitian yang telah dilakukan

mengenai kinerja pemerintah desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan masyarakat di desa Bontomanai Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar dengan melihat bagaimana kuantitas kerja, kualitas kerja, pengetahuan kerja, kerjasama, kreativitas dan kualitas pribadi pemerintah desa sudah cukup baik dan masih perlu ditingkatkan. Adapun indikator yang belum terpenuhi yaitu pengetahuan kerja dan kreativitas pemerintah desa yang masih kurang dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan. Adapun kendala dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa sering kali disebabkan oleh beberapa faktor yaitu iklim atau keterlambatan bahan material sehingga beberapa program tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan begitu juga dengan anggaran yang terbatas.

Yani Alfian & Apip Pudir Rahmat (2019) tentang Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Aparat Desa Di Desa Sangkanhurip Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung dalam penelitian ini, peran sebagai suatu kebijakan lebih berbicara bagaimana kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh kepala desa yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan UUD NO 6 Tahun 2014 dalam Pasal 26 Kepala Desa memiliki Tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Kepala desa berkedudukan sebagai kepala pemerintah desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.

2. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintah desa melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) kepala desa memiliki fungsi-fungsi sebagai Penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti tata Praja Pemerintahan penetapan peraturan desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, elakukan upaya perlindungan masyarakat, administarasi kependudukan serta penataan dan pengelolaan wilayah.

Pemerintah desa Bakustulama dalam melaksanakan program kerja terhadap empat bidang yaitu Bidang penyelenggaran pemerintah, bidang peleksanaan pembangunan, bidang kemasyarakatan, dan bidang pemberdayaan masyarakat. Dalam laporan intstansi pemerintah desa Bakustulama masih terdapat kekurangan yaitu tidak ada muatan indikator kerja dan ada pengeluhan bahwa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat masih kurang adanya partisipasi dari pemerintah desa, BPD dan masyarakat.

1. Kurangnya kedisiplinan dalam bekerja yang dilakukan oleh perangkat desa Bakustulama.
2. Kurang giat dalam bekerja dibuktikan dengan adanya pekerjaan pembuatan akta kelahiran tidak dikerjakan secepat mungkin, justru malah menunda-nunda pekerjaan.

3. Kurangnya kerjasama antar sesama aparatur desa sehingga dalam pelayanannya lambat.
4. Kurangnya ketegasan dari Kepala Desa dalam membina perangkat desanya.

Berdasarkan hasil pengamatan sementara, Pemerintah desa dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat masih terdapat penundaan pelayanan, kartu tanda penduduk/KTP, Kartu keluarag/KK, kurang disiplin dalam pelayanan Masyarakat karena realitanya dalam lapangan adalah kualitas sumber daya aparatur desa masih rendah, dibuktikan dengan tingkat pendidikan aparatur pada umumnya hanya lulus SD, SMP, dan SMA. lalu mengenai jam mulai kerja telah ditentukan yaitu pukul 08:00 dan selesai pada pukul 15:00 tetapi kenyataannya sebagian besar dari jumlah perangkat desa yang ada selalu berangkat siang yaitu jam 09:00 dan ada pula yang berangkat lebih dari jam 09:00, kemudian ketika waktu menunjukkan jam pulang kerja, semua perangkat desa pulang lebih awal dari jam pulang kerja yang telah ditentukan, dengan alasan bahwa tidak ada lagi masyarakat yang berurusan di kantor. Ketika perangkat desa ada urusan dengan masyarakat dalam hal melayani masyarakat, pelayanan yang diberikan pun sangat lambat. Banyak masyarakat mengeluh dengan pelayanan yang diberikan karena dalam proses pembuatan KTP sangat berbelit-belit dan menunggu waktu yang lama dengan alasan masih dalam proses pembuatan. Hal ini yang perlu disoroti adalah kinerja dari Kepala Desa selaku pemimpin desa yang mempunyai tugas mengatur dan mengelola desa sesuai dengan aturan-aturan yang ada agar tujuan yang diharapkan Pemerintah Desa dapat tercapai.

Hal lain yang menyebabkan kinerja pemerintah desa Bakustulama rendah kurangnya inisiatif terhadap pelayanan pemerintah desa, kurang memahami tugas pokok dan fungsi, dalam melakukan pelayanan, kurangnya sarana dan tingkat pendidikan belum memadai. Karena alasan diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang **”ANALISIS KINERJA KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT (STUDI PENELITIAN TENTANG PEMBUATAN KTP DAN KARTU KELUARGA/KK DI DESA BAKUSTULAMA KECAMATAN TASIFETO BARAT KABUPATEN BELU).”**

1.2 RUMUSAN MASALAH

Rumusan Masalahnya adalah Bagaimana Kinerja Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Kepada Masyarakat (Studi Penelitian Tentang Pembuatan KTP Dan Kartu Keluarga/KK Di Desa Bakustulama Kecamatan Tasbar Kabupaten Belu?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Untuk Menggambarkan Analisis Kinerja Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Kepada Masyarakat (Studi Penelitian Tentang Pembuatan KTP Dan Kartu Keluarga/KK Di Desa Bakustulama Kecamatan Tasifeto Barat Kabupaten Belu).

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan tujuan penelitian ini maka diharapkan penelitian dapat memberikan manfaat dan kegunaan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu untuk menambah referensi dipergustakaan pusat pada umumnya dan secara khusus lagi digunakan untuk membantu memberikan sumbangan pemikiran referensi bagi penelitian yang akan datang.

2. Manfaat praktis

Manfaat yang dapat di Kantor Desa Bakustulama Kecamatan Tasbar Kabupaten Belu adalah sebagai bahan masukan dalam memperbaiki kinerja Kepala Desa dalam memberikan pelayanan dalam pembuatan surat-surat kepada masyarakat agar lebih baik dan professional.